

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (1st ed.). Kencana Prenada Media.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum* (ketiga). Sinar Grafika.
- Anak Agung Gede Oka Parwata, dkk. (2016). *Memahami Hukum dan Kebudayaan* (1st ed.). Pustaka Ekspresi.
- Arikunto, S. (1995). *Dasar – Dasar Research*.
- Degener, T. (199 C.E.). International disability law-A New Legal Subject On The Rise. *International*, 1, 188.
- Eko Riyadi. (2018). *Hukum Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional dan Nasional* (1st ed.). Rajawali Pers, 2018.
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Tahkim*, 10(2), 160–168.
- Dinas Perhubungan Kota Bandung (2017). *Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung*.
- Listiana Ragil .A. (2013). *Perkembangan Psikoseksual Pada Anak dengan berkebutuhan khusus tuna daksa cerebral palsy, Fakultas Psikologi UMP, 2016. 2011*, 8–35.
- Mertokusumo, S. (2004). *Penemuan Hukum*. Liberty.
- Moh. Mahfud MD. (2002). *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*. UII Press.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia* (1st ed.). The Habibie Center.
- Natan Lerner. (1991). *Diskriminasi dan Perlindungan HAM*. PT Sumber Baru, Jakarta.
- Nur Kholis Raefani. (2013). *Panduan Anak Berkelebihan Khusus*. Imperium, 2013.
- Dr. Emzir, M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitattif Analisis Data* (Ed.1). Rajawali Pers, 2016.
- Dr. Muladi, H, S. (Ed.). (2005). *HAK ASASI MANUSIA - HAKEKAT, KONSEP & IMPLIKASINYA DALAM PRESPEKTIF HUKUM & MASYARAKAT*. PT Refika Aditama.

- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Thesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, 2013.
- Saptosih, I. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)* (Retno Widyani, M.S. (Ed.)). Deepublish.
- Smith, R. K. . (2005). *Textbook on International Human Rights* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Smith, R. K. M. S., Høstmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)* (E. R. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki (Ed.)). Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Soekanto, S. (1985). *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Remaja Karya.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hak-Hak Asasi Manusia : Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangan dalam Toleransi dalam Keragaman*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation.
- Sugiono, Ilhamnudin, & Rahmawan, A. (2014). Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance. *Indonesian Journal of Disability Studies, 1*(Klastering), 20–26.
- Suharto. (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PT. Indah.
- Suryasaputra, R. (2006). *Perlindungan Hak Asasi (Bagi kelompok khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan)*. PTIK, Press Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B). (1995). *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Usman, R. (2000). *Asas-Asas Hukum*. Djambatan.
- Utami, S. N. dan R. (2005). *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*. Yayasan Talenta.
- Winarno. (2018). *PARADIGMA BARU PENDIDIKAN PANCASILA* (Restu Damayanti (Ed.); 4th ed.). Bumi Aksara.
- Zulkarnain, R. (2013). PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS (RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES). *Ilmu Hukum, 7 No. 2*, 231.

## B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Indonesian Journal of International Law, (1948)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

## C. Sumber Lain

Aldee Regi Rizqilloh. (2020). *Analisis Aksesibilitas Pada Angkutan Umum Bus Damri Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung*.

Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>

Barlian, A. E. A. (2017). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 605. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801>

Budiman, A. R. (2017). Studi Analisa Jumlah Kebutuhan Armada Taksi di Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 5–29.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. (2022). *Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kategori Disabilitas di Jawa Barat*. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-penduduk-penyandang-disabilitas-berdasarkan-kategori-disabilitas-di-jawa-barat>

Eko, H. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(2), 56534.

<https://www.neliti.com/publications/56534/>

- Iii, B. A. B., Dan, O., & Penelitian, M. (2001). *repository.unisba.ac.id*. 52–67.
- Komisi Yudisial. (2016). *Masyarakat Berperan Penting dalam Penegakan Hukum*. Judicial Commission.  
[https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/213/masyarakat-berperan-penting-dalam-penegakan-hukum](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/213/masyarakat-berperan-penting-dalam-penegakan-hukum)
- Priyambodo, D. A. (2018). Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Yogyakarta (Studi Pada Layanan Trans Jogja). *Skripsi, Universitas Islam Indonesia*, 1–103.
- Produk, T., & Daerah, H. (2019).  
*Naskah Akademik Perda Produk Hukum Daerah Kota Kediri Revisi (1)*.
- Puspitho, P., & Farhan, M. (2022). *Perlindungan Konsumen Melalui Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penggunaan Angkutan Umum Bus Antar Kota Perkembangan sarana dan prasarana transportasi memiliki peran penting sebagai alat hubung antar wilayah untuk menunjang , mendorong , dan meng.* 6(1), 135–156.
- Sandra Fitriyana. (2018). Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Untuk Penyediaan Aksesibilitas Fisik Di Kota DKI Jakarta [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. In *Energies* (Vol. 6, Issue 1).  
<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>
- Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus. (2019). *Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas*. <https://spapabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas>